

MEMBANGUNKAN MANAJEMEN PENDIDIKAN NASIONAL: REVITALISASI VISI DAN STRATEGI MENJINAKKAN METAKUASA GLOBAL

Teguh Triwiyanto

Jurusan Administrasi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Kota Malang Jawa Timur
E-mail: teguh.triwiyanto.fip@um.ac.id

Abstrak: Tujuan artikel ini berupaya membangun manajemen pendidikan nasional melalui revitalisasi visi dan strategi menjinakkan metakuasa global. Kompetisi global, sebagai anak kandung globalisasi, membawa dampak di sektor pendidikan, salah satunya internasionalisasi pendidikan yang mengarah kepada kapitalisasi, liberalisasi, dan komodifikasi pendidikan. Internasionalisasi pendidikan terwujud melalui empat formasi, yaitu *cross border supply*, *consumption abroad*, *movement of natural person*, dan *commercial presence*. Untuk merebut daya saing, diperlukan komponen yang semestinya ada dalam rumusan visi dan rencana strategis manajemen pendidikan nasional.

Kata kunci: manajemen pendidikan nasional, visi, strategi, globalisasi

Abstract: The purpose of this article seeks to awaken the national education management through revitalization vision and strategy to tame the raging global power. Global competition, as a result of globalization, impact on the education sector, one of the internationalization of education that leads to the capitalization, liberalization, and educational commodification. Internationalization of education realized through four formations, namely cross-border supply, consumption abroad, movement of natural persons and commercial presence. To seize competitiveness, there should be a necessary component in the formulation of the vision and strategic plan for national education management.

Keywords: national education management, vision, strategy, globalization

Globalisasi itu asal muasalnya cinta, sepotong hasrat untuk tumbuh dalam kemakmuran, ekonomi, kemajuan teknologi, dan rezim yang lebih demokratis. Tetapi, globalisasi memang bukan semata-mata cerita tentang kebutuhan neurotik sebuah bangsa atas cinta seperti itu – bukan cinta remeh temeh – karena bangsa harus keluar dari problem keterasingan dan pembentukan diri-bangsa yang rendah diri untuk berdiri sejajar terhadap bangsa-bangsa lain. Seperti juga cinta – emosi yang melebur dalam lingkungan yang simbolik dan purba – globalisasi didorong oleh kebutuhan dan hasrat utama dari kemanusiaan primitif – termasuk objek-objek ritual religio-magis manusia – adalah memastikan perkembangan dan peningkatan sumber makanan, hewan (buruan), sayuran,

dan rempah-rempah. Hasrat tersebut, akan melahirkan apa yang oleh Freud (dalam Hall, 2000:148), disebut dengan kehendak berkuasa, jiwa yang merupakan tiran dan tidak mengenal batas kuasa.

Cinta, globalisasi, dan kehendak berkuasa tersebut dapat terbaca dengan jelas pada sejarah kelim Pulau Run, sebuah pulau kecil yang terpencil, di gugusan Kepulauan Banda, sepi dan terabaikan di tengah ribuan pulau-pulau di Indonesia. Pulau yang pada masa kini, merupakan tempat yang tidak begitu penting sehingga bahkan tidak masuk ke dalam peta. Namun, siapa sangka, seperti diungkap Milton (2015: 3), bahwa ternyata pulau ini, iya pulau ini, pernah ditukar dengan Manhattan, sebuah pulau yang terletak di sebelah selatan ujung Sungai Hudson, satu dari lima kota bagian yang membentuk Kota New York.

Akhir abad ke-16 pulau ini dilukiskan sebagai tanah yang tidak memiliki satu pohonpun kecuali pala, sehingga seluruhnya tampak seperti kebun buah yang di tata. Panen rempah-rempah mengubah Pulau Run menjadi pulau yang paling berharga dari kepulauan rempah-rempah lainnya di Indonesia. Kompetisi antarbangsa untuk saling berebut sengit terjadi, *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dan sekelompok tentara Inggris yang dipimpin oleh seorang kapten pemberani, Nathaniel Courthope. Hasil dari perebutan tersebut adalah satu penawaran paling spektakuler dalam sejarah: Inggris menyerahkan Pulau Run ke Belanda, dan sebagai imbalannya Inggris diberi sebuah pulau lain, yakni Manhattan.

Jaringan internasional terjadi juga pada abad-abad sebelumnya, Laksamana Cheng Ho dengan 200 kapal beserta 30.000 orang di dalamnya melakukan perdagangan dengan kaum pribumi Indonesia. Zarkhoviche (2015:133) menyebutkan bahwa Cheng Ho membawa barang-barang seperti emas, karya seni bernilai seni tinggi, dan juga kain sutra. Barang-barang tersebut biasanya akan ditukar dengan bahan obat-obatan, rempah-rempah, batu permata dan lain sebagainya. Selain perdagangan, terjadi juga kontak budaya dan penyebaran agama islam di Asia Tenggara, nusantara. Gerakan modern islam masa 1900-an juga tidak pelak dari persinggungannya dengan dunia internasional, disertasi Noer (1982:316) menyimpulkan bahwa publikasi di bangsa-bangsa Timur Tengah membawa dan telah menjangkiti pemikiran tokoh-tokoh Indonesia, terutama Muhammad Abduh dan Rashid Redha. Jauh sebelum masa-masa itu, di abad ke-4 Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama dan abad ke- 15 Majapahit wilayah sangat luas, nusantara tempat ratusan (suku) bangsa hidup berdampingan.

Masa-masa kerajaan Hindu dan Budha di Indonesia dikenal berbagai pusat pendidikan, Sriwijaya dan Majapahit memiliki sistem pendidikan yang bahkan menjadi magnet sehingga didatangi pelajar dari luar negeri. Masa kerajaan Islam pendidikan bercorak pesantren menjadi salah satu lokomotif perubahan sosial masyarakat. Berdekatan dengan tahun-tahun itu, kerajaan Demak, Ternate, Tidore, Samudera Pasai, dan Mataram Islam pada masanya merupakan kerajaan yang bercorak Islam dan kebanyakan pemimpinnya merupakan produk pendidikan ala Islam, pesantren. Pendidikan pesantren ini, dalam disertasi Azra (2002) memperlihatkan adanya jaringan islam nusantara, melalui ulama, tradisi penulisan karya ilmiah (kitab) melalui pola afiliasi dengan Haramain, pada situasi ini kemudian tumbuh dengan subur jaringan intelektual pesantren.

Pergaulan antarbangsa yang sudah terjadi sejak lama, globalisasi menjadi jargon baru yang mengatasi bangsa-bangsa dalam tata pergaulan internasional, setelah keruntuhan sistem Bretton Woods awal tahun 1970-an. Bangsa atau *nation*, komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan (Anderson, 2002:2), benar-benar memasuki nasionalisme babak akhir. Globalisasi telah mendorong dan merobohkan sekat-sekat bangsa, sebuah bayangan tentang kebersamaan dalam komunitas mereka, sekarang komunitas itu tumbuh melampaui bangsa itu, walaupun indikator-indikatornya masih tetap terbuka untuk diperdebatkan. Sekat perdebatan globalisasi sudah pudar, seperti ajakan Stiglitz (2006) untuk mengakhiri debat lama antara globalisasi dan kontraglobalisasi dengan selangkah lebih maju pada persoalan tata kelola globalisasi (*global governance*).

Kembali ke bidang pendidikan, saat ini, ilmu dan teknologi negara dunia ketiga mengalami ketertinggalan dan dominasi negara-negara maju terhadap ilmu dan teknologi. Bahwa penciptaan dan pengintegrasian ekonomi global telah menghancurkan negara-negara yang miskin atau tidak memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) terhadap negara maju. Sumber daya alam yang selama ini menjadi *comparative advantage* bagi negara dunia ketiga menjadi faktor yang tidak diperhitungkan lagi, tetapi hanya menjadi *knowledge*.

Globalisasi telah mendorong terjadinya kompetisi bagi lembaga pendidikan yang tidak bersifat lokal atau regional saja, melainkan internasional. Kompetisi global tersebut membawa dampak di sektor pendidikan, salah satunya internasionalisasi pendidikan. Internasionalisasi pendidikan terwujud melalui empat formasi. Wirosuhardjo (2015:47) menyebutkan bahwa sistem perdagangan WTO (*World Trade Organization*) pada

perdagangan jasa, terutama pendidikan “dijualbelikan” dengan empat metode atau cara. *Pertama*, yang disebut cara *cross border supply*. Lembaga pendidikan pada suatu negara dapat menjual jasa pendidikan tanpa kehadiran fisiknya kepada konsumen di negara lain. Program pendidikan jarak jauh (*distance learning*) dan pendidikan maya (*virtual education*) merupakan model seperti ini. *Kedua*, yang disebut cara *consumption abroad*. Lembaga pendidikan suatu negara dapat menjual jasa pendidikan dengan menghadirkan konsumen dari negara lain. *Ketiga*, yang disebut cara *movement of natural persons*. Lembaga pendidikan di suatu negara merekrut pendidik dari negara lain. *Keempat*, yang disebut mode *commercial presence*. Lembaga pendidikan asing bermitra (*partnership*), membuka cabang (*subsidiary*), atau perkuliahan ganda (*twinning arrangement*) dengan lembaga pendidikan lokal.

Faktor pasar Indonesia potensial karena jumlah penduduknya yang besar, sayang belum menjadi berkah bagi kemajuan bangsa, juga menjadi alasan lain globalisasi hanya menjadikan Indonesia dan pendidikannya hanya sebagai bangsa *followers* saja. Indonesia dengan jumlah penduduk 252,3 juta orang saat ini merupakan peringkat keempat diantara 237 negara. Kondisi pendidikan dasar dan indeks pembangunan pendidikan kita masih belum memuaskan dan memang pada gilirannya memperlihatkan bahwa HDI-nya sangat rendah yaitu 108 dari 169 negara yang disurvei. Data lain juga memperlihatkan bahwa bangsa ini masih jauh dari rata-rata kualitas hidup bangsa lainnya. Dari mulai bayi lahir terancam kematian, pendidikan dasar yang buruk, kesehatan yang tidak memadai, pengangguran yang besar, infrastruktur tidak memadai, resiko kegagalan negara mengancam, dan rentannya harapan hidup.

Tentu saja arah globalisasi dan dampaknya terhadap pendidikan, membawa tantangan terhadap visi dan strategi manajemen pendidikan nasional ke depan, bersikap aktif menciptakan peluang, bukan diam atau bahkan larut tanpa berbuat membangun keunggulan komparatif. Bersisian dengan hal tersebut, tujuan artikel ini yaitu pada upaya membangunkan manajemen pendidikan nasional: revitalisasi visi dan strategi menjinakkan metakuasa global.

PEMBAHASAN

Manajemen Pendidikan Nasional: Empat Formasi Metakuasa Global

Tema pembangunan daya saing regional di mulai tahun 2015-2019, sementara daya saing internasional menjadi tema tahun 2020-2024, demikian dalam dokumen Rencana

Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Selebihnya dalam dokumen tersebut, tidak dijumpai kata globalisasi, dari dokumen setebal 134 halaman, hanya terdapat lima kata global untuk merujuk pada berorientasi, persaingan, dan budaya positif. Renstra tersebut merupakan visi dan misi dari kementerian yang bersangkutan, artinya kurang ada detail atau rincian yang memadai atas keberadaan globalisasi. Dokumen terkait dengan pendidikan, baik undang-undang dan kebijakan lain hampir tidak ada yang menyertakan kata itu.

Absennya globalisasi dalam berbagai macam produk kebijakan negara tersebut, oleh Cahyono (2008:142) disebutkan bahwa secara umum Indonesia belum memiliki posisi ekonomi politik nasional (*national position*) yang jelas sebagai dasar untuk memperkuat diplomasi. Indonesia belum memiliki dokumen nasional (*white paper*) yang secara resmi dan utuh membahas globalisasi. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025, globalisasi memang disinggung, tapi hanya sepintas tanpa rincian dan detail yang memadai.

Globalisasi, sebagai sebuah fakta kehidupan berbangsa-bangsa, hampir bukan menjadi prioritas utama bagi pengambil kebijakan pendidikan di Indonesia. Karena bukan menjadi prioritas utama, maka dapat hampir dapat dipastikan pula bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya sadar terhadap implikasi globalisasi. Sektor pendidikan, di mana sumber daya manusia disiapkan untuk berkompetisi global belum memiliki piranti yang jelas dalam mengelolanya, karena nuansa globalisasi adalah daya saing, alih-alih kerja sama. Rahardjo (2016) menyebut tiga komponen daya saing, yaitu (1) faktor produksi, berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia; (2) sistem kelembagaan yang dinilai dari segi efisiensi; dan (3) inovasi yang didasarkan kemajuan teknologi dan ketersediaan modal.

Sektor pendidikan yang menjadi pusat pembangunan komponen sumber daya manusia, membutuhkan sistem kelembagaan yang baik, dan inovasi teknologi untuk menjadi daya saing di pasar liberal, yang merupakan anak kandung kapitalisme global. Implikasi globalisasi membawa manajemen pendidikan nasional ke dalam persoalan yang benar-benar kabur, berada di antara batas-batas nasional. Globalisasi mengandung tantangan terhadap manajemen pendidikan nasional, kuasa yang susah tertolak karena perjanjian-perjanjian dalam WTO mengikat secara hukum (*legally-binding*) dan setiap keputusan yang dikeluarkan bersifat *irreversible* (tidak bisa ditarik kembali).

Formasi globalisasi terhadap manajemen pendidikan nasional, pertama yaitu, seperti diungkap di muka, *cross border supply*, menjual jasa pendidikan tanpa kehadiran fisik kepada konsumen di negara lain, melalui program *distance learning* dan *virtual education*. Penguasaan teknologi pendidikan dan pembelajaran yang berkembang sangat pesat akan menentukan posisi Indonesia, tertinggal atau melaju di depan. Hadirnya lembaga dari negara lain dalam sistem pendidikan nasional, melalui teknologi informasi yang canggih, membutuhkan tata kelola yang tidak mengorbankan bangsa sendiri. Dalam sebuah Forum Ekonomi Dunia (WED) di Davos, Swiss, 21 Januari 2016, Menteri Perdagangan Thomas Lembong memberikan wawasan, bahwa revolusi teknologi saat ini merupakan kelanjutan revolusi teknologi sebelumnya. Tahap pertama adalah penemuan mesin uap; kedua, penggunaan listrik dan minyak; lalu ketiga, ada penemuan komputer dan internet. Saat ini naik lagi tingkatannya, yaitu penerapan aplikasi teknologi yang lebih canggih (Kompas, 2016).

Selain formasi tersebut, Bruner (2011:4) menyebutkan bahwa di beberapa negara, globalisasi adalah kekuatan yang mengganggu perubahan dalam manajemen pendidikan, globalisasi telah merubah formasi asumsi, praktik, dan strategi. Dalam praktik pendidikan, globalisasi didorong oleh tujuan strategis yang terkait dengan banyak tren dalam lingkungan bisnis dan ekonomi global serta yang berkaitan dengan tren globalisasi dalam pendidikan.

Salah satu tren global tersebut yaitu penggunaan teknologi informasi yang sangat mudah untuk dirasakan kehadirannya pada saat ini, sayangnya tidak diikuti oleh lenyapnya dominasi, pemaksaan, dan manipulasi dalam manajemen pendidikan nasional. Meminjam istilah Arif & Utomo (2015:7), orde media dalam manajemen pendidikan nasional, di era kebebasan ini, kaum oligarki industri teknologi informasi berkuasa dengan merumuskan, mengatur, dan mengoperasikannya dengan semata-mata bersandar semata-mata pada pasar, termasuk pendidikan. Winters (2011:24) menyatakan bahwa oligarki menekankan keunggulan sumber daya material sebagai kekuatan politik maupun kekuatan ekonomi.

Praktik *cross border supply* ini terjadi karena adanya pembentukan pasar yang terjadi di negara-negara berkembang, tidak lebih dari konsolidasi lebih lanjut dari tiga pusat kekuatan ekonomi dunia, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Pusat ekonomi dunia pada tiga kekuatan tersebut, didukung penguasaan ilmu dan teknologinya, menjadikannya sekaligus sebagai pusat-pusat pendidikan model *cross border supply* ini. Standarisasi, kompetensi, dan sertifikasi lulusan ditentukan oleh negara-negara itu, benar-

benar manajemen pendidikan nasional tidak mampu menjangkaunya, model pendidikan tanpa “kopi darat” ini belum diatur dalam sistem pendidikan nasional.

Praktik-praktik konsolidasi dominasi kekuatan ekonomi besar dunia terhadap manajemen pendidikan nasional, misalnya tampak pada pengendalian standarisasi sistem mutu, pemeringkatan lembaga pendidikan, dan sampai pada otorisasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi melalui berbagai macam indeks. Sekali lagi, oligarki yang menekankan keunggulan sumber daya material sebagai kekuatan politik maupun kekuatan ekonomi, telanjang dipraktikkan situasi tersebut. Negara-negara miskin akan sulit sekali keluar dari jerat ketertinggalan dan keterbelakangan, manajemen pendidikan nasional hampir dapat dipastikan tunduk kepada kekuatan besar negara-negara maju yang mendominasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hampir mustahil akan terjadi negara-negara tertinggal akan mendesak dan merangsek untuk naik posisi, sepertinya tepatlah belaka diungkapkan Darwin (2015:442) banyak langkah-langkah sehingga makhluk hidup manapun tidak sampai kekeadaan yang sekarang, karena sungguh-sungguh tidak ada yang benar-benar membuat lompatan, “*natura non facit saltum*”.

Negara-negara maju yang sebagian besar penganut sistem pasar liberal yakin, bahwa daya saing dipengaruhi derajat kebebasan ekonomi. Semakin bebas sistem ekonomi, daya saing semakin meningkat, kebebasan ekonomi dilihat dari minimnya campur tangan pasar oleh negara. Dalam sektor manajemen pendidikan sama saja, peran publik negara dikerangkeng dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sektor swasta. Pandangan ini berbahaya jika diterapkan sepenuhnya, walaupun sampai saat ini belum ada sikap yang jelas mengenai praktik *cross border supply* ini, tetapi yang cukup berarti di sini yaitu tahun 2014 Indeks Kebebasan Ekonomi Indonesia dalam lingkup MEA pada posisi ke-6. Artinya, hal ini dapat dijadikan cermin mengenai manajemen pendidikan nasional, bahwa pengendalian pasar oleh negara relatif kuat. Tetapi paradoksnya, seperti diungkap Rahardjo (2016), dari sudut pandang liberal, daya saing perekonomian Indonesia ternyata relatif baik, yaitu diposisi ke-4.

Naga-naganya kebijakan manajemen pendidikan nasional terkait dengan praktik *cross border supply*, tidak akan jauh berbeda, pengendalian yang cukup kuat dari negara. Dibutuhkan peran aktif negara dalam mengelola aspek-aspek manajemen pendidikan tersebut, dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasinya. Termasuk di dalamnya penyelesaian persoalan-persoalan yang muncul dikemudian hari, mekanisme hukum yang bersifat transnasional. Pengendalian kuat dari negara tersebut memang

kemudian tampak laah dan bahkan mengadopsi mentah-mentah, apa yang kemudian di Indonesia tumbuh dengan cepat liberalisasi dan komodifikasi pendidikan, hal ini tampak dari beberapa praktik yang dilakukan pemerintah.

Praktik awal liberalisasi pendidikan tersebut, oleh Darmanityas, Subkhan, & Panimbang (2014:3) pada tingkat perguruan tinggi dimulai dengan privatisasi empat Perguruan Tinggi Negeri terkemuka, yaitu UI, UGM, ITB, dan IPB menjadi PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara) pada tahun 2000. Pada tingkat SD-SMTA, kecenderungan liberalisasi itu ditandai dengan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dimplementasi di lapangannya ditandai dengan pembentukan komite sekolah di mana peranan yang ditonjolkan adalah fungsi pencarian dana untuk mengganti genteng yang bocor atau tembok yang rusak, tampak pada iklan sosialisasi di televisi saat menjelang pembentukan komite sekolah tahun 2002.

Formasi kedua, yaitu *consumption abroad*. Cara terjadi sudah sejak lama, seperti pada kerajaan Sriwijaya, lembaga pendidikan suatu negara dapat menjual jasa pendidikan dengan menghadirkan konsumen dari negara lain. Saat ini, mungkin agak sulit membicarakan daya saing untuk merebut praktik *consumption abroad* ini. Masalah akses dan mutu pendidikan masih menjadi persoalan utama, akses pendidikan memperlihatkan bahwa masih banyak provinsi dan kabupaten/kota yang belum tuntas wajib belajar, walaupun seperti itu pemerintah mulai tahun 2013 mewajibkan pendidikan 12 tahun. Perbaikan mutu yang hampir menjadi program setiap menteri yang duduk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi sampai sekarang persoalan tersebut belum tuntas. Mutu pendidikan belum terangkat dan duduk sejajar dengan negara-negara lain, paling tidak semestinya di Asia Tenggara atau Asia.

Globalisasi mendorong adanya otoritarian dalam bidang ilmu dan teknologi, dua yang pokok dalam daya saing pendidikan. Kebebasan akademik dan mimbar akademik yang mulai terang sejak tumbangnya orde baru, salah-salah menjadikan pengelola negara menjadi tidak tahu kemana dunia pendidikan nasional akan dikembangkan. Arus ilmu dan teknologi yang masuk dan peluang *consumption abroad*, dapat berdampak pada semakin pluralisnya struktur kekuasaan, di mana manajemen pendidikan nasional dikendalikan. Rentang kekuasaan yang semakin melebar, tersebar dalam banyak kekuatan, termasuk politik, sangat dimungkinkan terjadi praktik tawar menawar berbagai macam kepentingan. Kondisi seperti itu tidak akan membawa pendidikan Indonesia ke mana-mana, tetap dengan mutu yang buruk. Maka, otoritarian dalam bidang ilmu dan teknologi niscaya

terjadi, dengan bangsa-bangsa maju sebagai pemilik puncak-puncak pengetahuan, seperti saat ini.

Terkait dengan penguasaan ilmu dan teknologi, Brooks & Normore (2010:52) menganggap penting kepemimpinan pendidikan dalam perspektif global. Bahwa dibutuhkan kepemimpinan pendidikan untuk melakukan eksplorasi bagaimana konsep globalisasi, integrasi yang berarti kekuatan lokal dan global, dapat membantu para pemimpin pendidikan menginformasikan dan meningkatkan pedagogi dan praktik mereka. Para pemimpin pendidikan kontemporer harus mengembangkan literasi global di sembilan domain pengetahuan khusus: melek politik, melek ekonomi, melek budaya, literasi moral, literasi pedagogis, literasi informasi, literasi organisasi, melek spiritual dan religius, dan keaksaraan temporal. Selain itu, masing-masing domain melek huruf adalah dinamis, saling berhubungan, dan dapat dipengaruhi oleh lembaga kepemimpinan pendidikan.

Tetapi memang, kepemimpinan pendidikan bukan tanpa dilema dalam berhubungan dengan praksis pendidikan, berhubungan dengan globalisasi. Hasil penelitian Yin, Lee, Kin, & Wang (2014:293) dalam praktik di negara China menunjukkan bahwa pemimpin pendidikan dihadapkan pada di sebuah dilema yang timbul dari tiga nilai-nilai budaya yang saling bertentangan, yaitu budaya kepatuhan, budaya pemeriksaan, dan budaya pedagogik baru yang dianjurkan oleh reformasi. Dilema ini berasal dari adaptasi lokal dalam menanggapi tren globalisasi.

Formasi ketiga, yang disebut *cara movement of natural persons*. Situasi ini sebenarnya lazim dan menjadi kebutuhan untuk pengembangan pendidikan suatu bangsa, lembaga pendidikan di suatu negara merekrut pendidik dari negara lain. Selalu orang-orang terbaik menjadi incaran lembaga-lembaga pendidikan terbaik, sedangkan bangsa pengirimnya masih berkuat pada persoalan-persoalan tradisional. Di Indonesia, contoh yang gamblang adalah dengan apa yang disebut sebagai masyarakat diaspora, karena keahlian dan ilmunya mengabdikan di luar negeri. Malah, kebanyakan bingung ketika diminta kembali ke Indonesia, keahlian dan ilmunya bisa tidak terpakai atau tidak ada yang memakainya.

Movement of natural persons dalam praktik manajemen pendidikan nasional adalah hilangnya potensi pendidik dengan keahlian dan ilmunya, selain itu adanya ketidakpastian mutu pendidikan karena ditinggalkan pendidik terbaik. Jangankan sebuah bangsa, tim sepak bola dengan pemain-pemain terbaiknya, lebih memiliki potensi menjuarai kompetisi, dari pada tim gurem dengan pemain yang bukan siapa-siapa. Pola perencanaan,

pengadaan, seleksi, orientasi, penempatan dan penugasan, kompensasi dan kesejahteraan, pemberdayaan, pengembangan kompetensi keprofesian dan jalur karier, penilaian kinerja, yang selama ini menjadi acuan baku, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan perluasan-perluasan. Perbaikan, bahwa globalisasi telah membuka akses terhadap pendidik-pendidik yang bagus untuk dipekerjakan, lintas lembaga pendidikan dan lintas negara, termasuk manajemen pendidikan nasional dapat menerima pendidik dari negara lain, diperlukan sistem yang cocok itu hal tersebut. Perluasan, mengandung arti bahwa mandat pendidikan menjadi terbuka, bukan dalam skala nasional saja melainkan global, karena universalitas ilmu, maka kualifikasi dan kompetensi juga terukur antarnegara, internasional.

Pergaulan intelektual global sangat mungkin terjadi dan menjadi simpul-simpul pertumbuhan ilmu dan mendorong perubahan bangsa ke arah lebih baik. Kondisi tersebut, dengan sangat bagus diungkap Anderson (2015), yang memetakan interaksi intelektual yang kompleks antara dua penulis besar Filipina, Jose Rizal dan Isabelo de los Reyes, dengan perpolitikan dan sastra avant-garde Eropa dan menunjukkan bagaimana simpul-simpul terbentuk dan terhubung dalam suatu “globalisasi perdana” antara gerakan-gerakan nasionalis dengan para aktivis anarkis global saat itu.

Formasi keempat, yang disebut mode *commercial presence*. Lembaga pendidikan asing bermitra (*partnership*), membuka cabang (*subsidiary*), atau perkuliahan ganda (*twinning arrangement*) dengan lembaga pendidikan lokal, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 90 pemerintah telah mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh negara lain. Disebutkan, bahwa perguruan tinggi lembaga lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Indonesia sesuai dengan persyaratan sebagai berikut: (1) perguruan tinggi lembaga negara lain tersebut sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya; (2) pemerintah yang menetapkan daerah, jenis, dan program studi yang dapat diselenggarakan perguruan tinggi lembaga negara lain tersebut; (3) memperoleh izin pemerintah; (4) berprinsip nirlaba; (5) bekerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia atas izin pemerintah; (6) mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia; dan (7) perguruan tinggi lembaga negara lain tersebut sebagaimana wajib mendukung kepentingan nasional.

Walaupun sudah di atur melalui undang-undang, tetapi masih sangat umum, pintu MEA yang mulai dibuka pada akhir tahun 2015, membutuhkan peraturan yang lebih spesifik terkait dengan *commercial presence*. Perlu diatur lembaga pendidikan negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Indonesia, musti memiliki standar di

atas standar nasional pendidikan (SNP) Indonesia. Standar tersebut sebagai indikator tujuan layanan manajemen pendidikan nasional. Standar tersebut dapat meliputi: (1) layanan kurikulum dan pembelajaran yang sejalan dengan kebijakan standar pendidikan nasional, terutama sebagai dasar atau standar dalam proses pendidikan; (2) kompetensi lulusan menjadi tujuan layanan peserta didik; (3) layanan pendidik dan tenaga kependidikan diarahkan untuk pencapaian kinerja dalam menciptakan kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan; (4) acuan penggunaan keuangan pendidikan untuk pembiayaan program kegiatan pendidikan dengan skala prioritas dan mengarahkan dana tepat pada sasaran kegiatan merupakan tujuan layanan keuangan pendidikan nasional; (5) layanan sarana dan prasarana pendidikan bertujuan untuk meningkatkan standar nasional yang ada; dan (6) partisipasi masyarakat bertujuan untuk membantu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Perlindungan terhadap lembaga pendidikan nasional menjadi mendesak dilakukan, karena memang saat ini kebijakan tidak berpihak kepada lembaga pendidikan nasional. Bahkan selama Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berlaku, maka lembaga pendidikan nasional tidak mendapatkan perlindungan dengan baik. Pasal 53 undang-undang tersebut jelas-jelas dijadikan dasar dan menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan oleh suatu badan hukum pendidikan (BHP) atau privatisasi, karena negara tidak bertanggung jawab sepenuhnya pada pendanaan pendidikan. Parahnya, pendidikan menjadi sektor yang terbuka untuk penanaman modal asing (PMA) dengan besaran persentase 40%, seperti diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007, dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka.

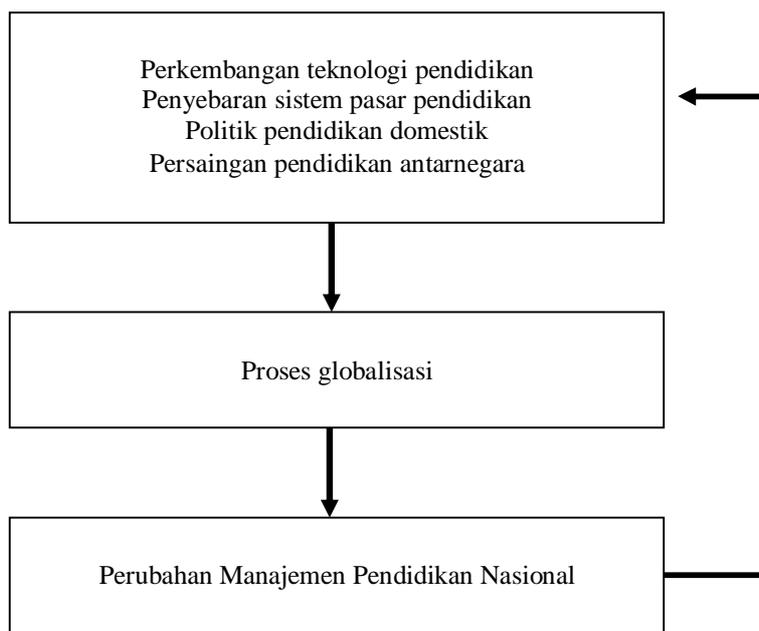
Usaha bidang terbuka artinya, sektor pendidikan merupakan komoditas yang keberadaannya ditentukan oleh pasar, termasuk pasar internasional, sunyi dari peran pemerintah. Tetapi, dalam konteks internasionalisasi pendidikan, karena format globalisasi, Chan (2008:184) menganjurkan pemerintah dalam mengambil kebijakan pendidikan untuk tetap menangkap realitas yang berbeda dan tetap mencerminkan pentingnya konteks internasional, nasional dan kelembagaan, serta peluang yang tersedia dan parameter pilihan dalam keputusan yang berkaitan dengan internasionalisasi.

Revitalisasi Visi dan Strategi Manajemen Pendidikan Nasional Menjinakkan Metakuasa Global

Nizam (2009:53) menyatakan bahwa globalisasi dan liberalisasi menimbulkan sejumlah tantangan. *Pertama*, menguatnya globalisasi berdampak pada memudarnya batas geografis dan geopolitik. Kecenderungan yang terjadi di berbagai belahan dunia, sejumlah negara terus membuka arus perdagangan global terhadap produk-produk barang dan jasa. Globalisasi juga diiringi dengan meningkatnya mobilitas dan migrasi antar warga negara di berbagai belahan dunia. *Kedua*, globalisasi dan liberalisasi juga ditandai dengan meningkatnya ragam kompetisi tidak hanya antar negara, akan tetapi juga antar kelompok masyarakat, antar perusahaan, dan antar individu. Kapasitas kompetisi dan nilai daya saing menjadi penentu bagi keunggulan masing-masing bangsa di dunia. *Ketiga*, globalisasi juga dibarengi dengan menguatnya tuntutan standard dan *benchmark* sebagai indikator ukuran kualitas lintas negara. *Keempat*, persaingan dalam memperebutkan tingkat kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di berbagai belahan dunia kian ditentukan oleh kreativitas, inovasi dan penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keunggulan seni dan budaya yang dimilikinya. *Kelima*, perkembangan peradaban global juga kian bergerak ke arah masyarakat ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge-based economy*), dimana keberadaanya ditentukan oleh sejauh mana kemajuan masyarakat ilmu pengetahuan (*knowledge society*), para pekerja yang berbasis pengetahuan (*knowledge workers*), dan modal pengetahuan (*knowledge capital*) yang dimilikinya.

Proses globalisasi pada sektor pendidikan didorong oleh perkembangan teknologi pendidikan, penyebaran sistem pasar pendidikan, politik pendidikan domestik, dan persaingan pendidikan antarnegara. Daya dorong globalisasi tersebut hampir serentak di dunia ini, tetapi dengan implikasi yang berbeda-beda pada setiap negara. Negara dengan kekuatan substantif, yang ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesejahteraan yang baik, akan memiliki keleluasaan membuat kebijakan yang akan memperkuat daya saing negerinya, dan sebaliknya. Proses globalisasi merupakan pengintegrasian agenda-agenda pembangunan nasional, - pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, jaminan sosial, lingkungan hidup – dalam satu sistem perekonomian global. Proses globalisasi tersebut mendorong adanya perubahan manajemen pendidikan nasional. Dalam manajemen pendidikan nasional, globalisasi dapat dipandang sebagai variabel independen dan dependen sekaligus. Sebagai variabel independen karena manajemen pendidikan nasional merupakan entitas bangsa dengan kepentingannya masing-masing dalam hubungannya

dengan dunia internasional. Pada gilirannya manajemen pendidikan nasional mengintegrasikan diri ke dalam kompetisi global untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai variabel dependen, manajemen pendidikan nasional secara terus menerus harus menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar global, kalau tidak mau menjadi bangsa tersinggir. Gambar 1 memperlihatkan hubungan globalisasi sebagai variabel independen dan dependen manajemen pendidikan nasional.



Gambar 1. Globalisasi Sebagai Variabel Independen dan Dependen Manajemen Pendidikan Nasional

Perubahan manajemen pendidikan nasional, terutama dengan melakukan revitalisasi visi dan strategi menjinakkan metakuasa global, menjadi sangat mendesak dilakukan. Jalan untuk melakukan itu yaitu dengan perbaikan terhadap dokumen-dokumen negara yang menjadi produk kebijakan, pada sektor pendidikan misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi melalui rencana strategisnya. Visi merupakan cita-cita masa depan yang ada dipemikiran para warga masyarakat. Visi juga merupakan representasi dari keyakinan mengenai bagaimanakah seharusnya pendidikan bangsa di masa depan. Selain hal tersebut, negara juga merumuskan dan menetapkan misi serta mengembangkannya. Selanjutnya, misi dirancang untuk memberikan tuntunan yang kuat dalam pengambilan keputusan manajemen pendidikan nasional. Misi merupakan adaptasi ringkas dari sebagian visi yang

telah dirumuskan melalui kalimat yang lebih operasional. Pada akhirnya, visi dan misi tersebut dijadikan landasan pemerintah dalam menyusun strategi pendidikan yang akan dilakukan dalam manajemen pendidikan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan sembilan agenda prioritas, yang dikenal sebagai Nawacita, yang sepenuhnya berlandaskan ideologi Trisakti. Ideologi Trisakti mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sementara itu Nawacita meliputi: (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; serta (9) memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Penyelarasan tema dan fokus pembangunan pendidikan tiap tahap kemudian dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025. Dalam perencanaan jangka menengah, masih dimungkinkan adanya penyesuaian atau perbaikan tema sesuai dengan kondisi terkini melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tiap periode pemerintahan, serta Rencana Strategis Kementerian yang ditugaskan. Tema-tema pembangunan pendidikan tiap tahap menurut Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 yang diselaraskan dengan tema pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), ditunjukkan pada periode pertama dalam RPPNJP, pembangunan pendidikan difokuskan pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi penyelenggaraan proses pembelajaran. Pada periode kedua, pemerintah mendorong penguatan layanan sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan

masyarakat. Pada periode ketiga, saat ini pembangunan pendidikan direncanakan sebagai tahap pendidikan yang menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional

Jika kita menengok isi Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, pada bagian Potensi dan Permasalahan, disebutkan sangat baik, bahwa potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan negara-negara lain. Sebagaimana ditunjukkan dalam Global Competitiveness Index (GCI), Indonesia mengalami peningkatan peringkat daya saing dari 55 pada tahun 2009-2010 menjadi peringkat 38 pada tahun 2013-2014. Seluruh indikator GCI Indonesia menunjukkan peningkatan sehingga saat ini Indonesia masuk pada tahapan transisi dari negara dengan *kategori efficiency driven economy* menjadi negara dengan kategori *innovation driven* yang merupakan kelompok negara-negara maju. Ditinjau dari pencapaian Human Development Index (HDI) Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari nomor 128 menjadi 124 dari 185 negara.

Selanjutnya pada bagian renstra tersebut juga, yaitu pada bab Potensi dan Permasalahan, bagian daya saing Indonesia di mata dunia internasional, disebutkan bahwa capaian mutu pendidikan Indonesia yang masih jauh di bawah capaian negara maju atau bahkan di bawah negara-negara tetangga Indonesia menjadi catatan dalam pembenahan mutu pendidikan di Indonesia. Nilai PISA Matematika tahun 2012 menunjukkan rata-rata capaian kompetensi siswa Indonesia berada pada level 1. Kondisi ini mendudukkan Indonesia di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, atau bahkan Vietnam.

Meskipun di dalam renstra tersebut terdapat kata/kalimat terkait, misalnya daya saing regional, Human Development Index, dan Global Competitiveness Index, tetapi sebagai visi yang kemudian di turunkan menjadi misi, tampak sekali bukan sebagai strategi menghadapi globalisasi. Lebih sebagai pengakuan terhadap kelemahan, oleh karenanya perlu diperbaiki, tanpa harus tahu dengan jalan apa untuk melakukan perbaikan. Kalau pun ada upaya perbaikan, titik tekannya kepada upaya perbaikan manajemen pendidikan nasional ke dalam, bukan dalam upaya menata dan terhubung dengan globalisasi, padahal implikasi globalisasi terhadap manajemen pendidikan nasional tidaklah sedikit.

Munadi & Barnawi (2011:158) menyebutkan implikasi globalisasi terhadap manajemen pendidikan nasional, terutama peluang dan tantangannya meliputi hal-hal berikut: (1) Pengembangan pusat unggulan (*center of excellent*) pada masing-masing lembaga pendidikan milik pemerintah sehingga ada diferensiasi dan produk yang dihasilkan; (2) Pengembangan kualitas layanan di semua komponen lembaga pendidikan

milik pemerintah; (3) Perluasan otonomi lembaga pendidikan milik pemerintah agar bisa lincah menghadapi perubahan; (4) Membangun kinerja lembaga pendidikan milik pemerintah yang bagus, kuat, dan profesional sehingga tidak memunculkan apatisme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya; (5) Pengembangan akuntabilitas dan transparansi di semua komponen lembaga pendidikan milik pemerintah-kepegawaiaan, keuangan, dan yang lainnya; dan (6) Membangun kerja sama antara lembaga pendidikan milik pemerintah dan lembaga lain dalam peningkatan mutu proses dan produknya.

Visi dan strategi manajemen pendidikan nasional seharusnya diletakkan pada kerangka besar, bahwa akses pendidikan cepat yang saat ini telah melahirkan program pendidikan jarak jauh (*distance learning*) dan pendidikan maya (*virtual education*). Pusat-pusat pendidikan dibuat secara virtual, tidak perlu lagi seorang siswa datang secara fisik untuk belajar, kurikulum dan pembelajaran tersedia sesuai kebutuhan, waktu belajar yang sangat luwes, pembayaran dilakukan secara *online*, kebutuhan fasilitas pendidikan yang sangat terjangkau (hanya dengan bermodal *smartphone* dan koneksi internet), evaluasi pembelajaran, dan cetak sertifikat/ijazah semua dilakukan secara daring.

Menjadi pusat-pusat pendidikan secara daring, mungkin akan berhadapan dengan bangsa lain yang sudah berjalan di muka, tetapi sebagai sebuah jenis pendidikan, maka keniscayaan akan menjadi salah satu sistem pendidikan nasional. Syukur-syukur pusat pendidikan tersebut menjadi pilihan untuk belajar, terutama oleh siswa dari Indonesia sendiri, di tengah kompetitor yang ketat. Universitas Terbuka mungkin dapat dijadikan percontohan untuk jenis pendidikan ini, walaupun tentu saja masih perlu banyak pembenahan terkait sistem dan tata kelolanya.

Sampai saat ini belum ada pengakuan kesetaraan sertifikat/ijazah pendidikan yang diperoleh secara daring, kalau memang persoalan utamanya pada proses pembelajaran yang diragukan, jelas-jelas pemerintah membutuhkan perangkat aturan yang meminimalisir praktik-praktik kecurangan tersebut. Respon adekuat dari pemerintah dapat dibuat dalam dua sisi manajemen pendidikan nasional sekaligus, satu sisi mendorong dan memperbaiki struktur dan infrastruktur pendidikan ke dalam, membuat perangkat kebijakan yang kompatibel terhadap jenis pendidikan ini, di sisi lainnya.

Karena negara lain dapat menjual jasa pendidikan dengan menghadirkan konsumen dari negara lain (termasuk Indonesia), maka manajemen pendidikan nasional tidak dapat mengelak untuk segera menjadikan kebijakan tersebut ada. Pola perekrutan pendidik dari negara lain, termasuk dari negara kita perlu menjadi modal untuk melindungi tenaga kerja

Indonesia. Walaupun mungkin Indonesia saat ini yang menjadi mitra yang lemah dengan negara lain, hanya menjadi lokasi untuk dibukanya cabang, atau pengirim perkuliahan ganda (bukan sebagai negara tujuan), tetapi pola pengaturan yang lemah saat ini merupakan ancaman nyata bahwa kondisi ini tidak beranjak di masa depan, tenggelam di antara bangsa-bangsa lain.

Hal lain mengenai visi dan strategi manajemen pendidikan nasional, di tengah kepungan bangsa-bangsa lain, harus tetap menjadikan budaya bangsa sebagai modal sosial, bukan beban sosial. Seperti diungkap Mudyaharjo (2012:299), bahwa budaya bangsa sendiri harusnya dipakai sebagai petunjuk jalan, untuk mencari penghidupan baru, yang selaras dengan kodrat bangsa dan akan memberi kedamaian dalam hidup. Dengan keadaban bangsa itu, maka lalu bangsa ini pantas berhubungan bersama-sama dengan bangsa asing.

Untuk merebut daya saing, diperlukan komponen yang semestinya ada dalam rumusan visi dan renstra manajemen pendidikan nasional, yaitu: (1) faktor produksi dalam sistem pendidikan nasional, berupa sumber daya pendidikan; (2) sistem kelembagaan pendidikan yang dinilai dari segi efisiensi; (3) inovasi pendidikan yang didasarkan kemajuan teknologi dan ketersediaan modal; (4) dibutuhkan peran aktif negara dalam mengelola aspek-aspek manajemen pendidikan nasional, dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasinya. Termasuk di dalamnya penyelesaian persoalan-persoalan yang muncul dikemudian hari, melalui mekanisme hukum yang bersifat transnasional; (5) melakukan efisiensi terhadap rentang kekuasaan yang semakin melebar, tersebar dalam banyak kekuatan, termasuk politik, untuk memotong terjadinya praktik tawar menawar berbagai macam kepentingan; (6) penyelenggara negara harus mengembangkan literasi global di sembilan domain pengetahuan khusus: melek politik, melek ekonomi, melek budaya, literasi moral, literasi pedagogis, literasi informasi, literasi organisasi, melek spiritual dan religius, dan keaksaraan temporal. Selain itu, masing-masing domain melek huruf adalah dinamis, saling berhubungan, dan dapat dipengaruhi oleh lembaga kepemimpinan pendidikan; dan (7) adanya perluasan dalam cakupan manajemen pendidikan nasional, mengandung arti bahwa mandat pendidikan menjadi terbuka, bukan dalam skala nasional saja melainkan global, karena universalitas ilmu, maka kualifikasi dan kompetensi juga terukur antarnegara, internasional.

Akhirnya, karena globalisasi itu asal muasalnya cinta, sepotong hasrat untuk tumbuh dalam kemakmuran, ekonomi, kemajuan teknologi, dan rezim yang lebih

demokratis, maka untuk menepis gagal paham cinta itu, manajemen pendidikan nasional mau tidak mau musti memberi balasan setimpal. Visi dan strategi manajemen pendidikan nasional yang juga harus terus tumbuh untuk kemakmuran, ekonomi, kemajuan teknologi, dan rezim pendidikan yang lebih demokratis, merupakan balasan setimpal itu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kompetisi global, sebagai anak kandung globalisasi, membawa dampak di sektor pendidikan, salah satunya internasionalisasi pendidikan yang mengarah kepada kapitalisasi, liberalisasi, dan komodifikasi pendidikan. Internasionalisasi pendidikan terwujud melalui empat formasi, yaitu *cross border supply*, *consumption abroad*, *movement of natural persons* dan *commercial presence*. Untuk merebut daya saing, diperlukan komponen yang semestinya ada dalam rumusan visi dan renstra manajemen pendidikan nasional, yaitu (1) faktor produksi dalam sistem pendidikan nasional, berupa sumber daya pendidikan; (2) sistem kelembagaan pendidikan yang dinilai dari segi efisiensi; (3) inovasi pendidikan yang didasarkan kemajuan teknologi dan ketersediaan modal; (4) dibutuhkan peran aktif negara dalam mengelola aspek-aspek manajemen pendidikan nasional, dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasinya. Termasuk di dalamnya penyelesaian persoalan-persoalan yang muncul dikemudian hari, melalui mekanisme hukum yang bersifat transnasional; (5) melakukan efisiensi terhadap rentang kekuasaan yang semakin melebar, tersebar dalam banyak kekuatan, termasuk politik, untuk memotong terjadinya praktik tawar menawar berbagai macam kepentingan; (6) penyelenggara negara harus mengembangkan literasi global di sembilan domain pengetahuan khusus: melek politik, melek ekonomi, melek budaya, literasi moral, literasi pedagogis, literasi informasi, literasi organisasi, melek spiritual dan religius, dan keaksaraan temporal. Selain itu, masing-masing domain melek huruf adalah dinamis, saling berhubungan, dan dapat dipengaruhi oleh lembaga kepemimpinan pendidikan; dan (7) adanya perluasan dalam cakupan manajemen pendidikan nasional, mengandung arti bahwa mandat pendidikan menjadi terbuka, bukan dalam skala nasional saja melainkan global, karena universalitas ilmu, maka kualifikasi dan kompetensi juga terukur antarnegara, internasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, B. 2002. *Imagined Communities Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar.
- Anderson, B. 2015. *Di Bawah Tiga Bendera Anarkisme Global dan Imajinasi Antikolonial*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Azra, A. 2002. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan.
- Brooks, J.S. & Normore, A.H. 2010. Educational Leadership and Globalization: Literacy for a Glocal Perspective. *Educational Policy*. Vol. 24 (1): 52-82.
- Bruner, R.F. 2011. Globalization Ofmanagement Education: Changing International Structures, Adaptive Strategies, and the Impact on Institutions. *Report of the AACSB International Globalization of Management Education Task Force*. Florida: AACSB International.
- Cahyono, I (ed). 2008. *Menjinakkan Metakuasa Global Suara Indonesia untuk Globalisasi yang Lebih Adil*. Jakarta: LP3ES.
- Chan, Wendy W.Y. 2008. The internationalization of universities Globalist, internationalist and translocalist models. *Journal of Research in International Education*. Vol. 7 (2): 184-204.
- Darmaningtyas, Subkhan, E, & Panimbang, F. 2014. *Melawan Liberalisme Pendidikan*. Malang: Madani.
- Darwin, C. 2015. *The Origin of Species By Means of Natural Selection*. Terjemahan Ira Tri Onggo. Yogyakarta: Indoliterasi.
- Hall, C.S. 2000. *Libido Kekuasaan Sigmund Freud*. Yogyakarta: Tarawang
- Kompas. 22 Januari 2016. *Penguasaan Teknologi Tentukan Indonesia*, hlm.17.
- Milton, G. 2015. *Pulau Run Magnet Rempah-rempah Nusantara yang Ditukar dengan Manhattan*. Tangerang Selatan: Alvabet.
- Mudyahardjo, R. 2012. *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munadi, M & Barnawi. 2011. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Nizam. 2009. *Developing World Class University*. Makalah dipresentasikan di Universitas Indonesia. 2009:3-5. Lihat Sahid Susanto and Nizam. 2009. Gadjah Mada University Indonesia, dalam N.V.Varghese. 2009. Higher Education Reform: Institutional

- Restructuring in Asia. Paris: Institutional Institute for Educational Planning-UNESCO. Halaman 53-80.
- Noer, D. 1982. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka.*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka.*
- Rahardjo, M.D. 20 Januari 2016. MEA: Kerja sama atau Persaingan. *Kompas*, hlm.8.
- Stiglis, J. 2006. *Making Globalization Work*. New York: WW Norton & Company.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025.*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.*
- Winters, J. 2014. Oligarki dan Demokrasi di Indonesia. *Prisma*. Vol. 33. No. 1
- Wirosuhardjo, K. 2015. *PTS Sayang, PTS Perlu Ditimang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Yin, H., Lee, John Chi-Kin, & Wang, W. 2014. Dilemmas of leading national curriculum reform in a global era A Chinese perspective. *Educational Management Administration Leadership*. Vol. 42(2): 293-311.
- Zarkhovich, B. 2015. *Laksamana Cheng Ho Panglima Islam Penakluk Dunia*. Yogyakarta: Araska.